

ANALISIS KEBANGKITAN PEREKONOMIAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA LANGSA MASA PANDEMI COVID-19

Author:

Andi Tarlis
Ernawati
Zulfa Eliza

Affiliation:

Politeknik LP3I Kampus Langsa
Politeknik LP3I Tasikmalaya
IAIN Langsa

Corresponding email

anditarlis@gmail.com



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Para pedagang kaki lima merupakan salah satu motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Penelitian ini terpusat pada para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa. Di sana terdapat kurang lebih 70 pedagang kaki lima dengan berbagai tawaran barang dagangannya. Ada 4 (empat) tujuan utama dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran sektor informal pedagang kaki lima di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat; Untuk mengetahui prospek dalam pengembangan usaha pedagang kaki lima di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa sebagai obyek wisata; untuk mengetahui prospek dalam pengembangan usaha pedagang kaki lima di Jalan Cut Nyak Dhien sebagai penghasil retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa; untuk mengetahui kebangkitan ekonomi pedagang kaki lima di kota langsa masa pandemi covid-19. 10 (sepuluh) orang narasumber ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dimana 7 diantaranya adalah para pedagang kaki lima, 2 orang dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa, serta 1 orang dari Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Langsa. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdagangan jalanan (pedagang kaki lima) telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer di kalangan penduduk kota Langsa. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat antusias dalam membantu para pedagang tersebut dalam meningkatkan pendapatan mereka dengan cara merelokasi tempat perdagangan, memberikan pinjaman keuangan serta memberikan pembinaan yang bersifat membangun bagi mereka.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, pertumbuhan ekonomi, sektor informal

Pendahuluan

Daerah perkotaan merupakan ruang permukaan daratan di mana terdapat konsentrasi penduduk dengan segala kegiatan yang membutuhkan tersedianya prasarana dan sarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk di daerah perkotaan menunjukkan perkembangan yang makin meningkat, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang luas, pendapatan yang lebih tinggi dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka ragam.

Perekonomian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan akan sandang dan pangan harus dipenuhi setiap harinya. Perekonomian suatu masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk mengukur kestabilan suatu bangsa dan

negara. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari tingkat ekonomi masyarakatnya.

Latar belakang munculnya Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ini adalah karena adanya kelemahan dari Ilmu Ekonomi tradisional yang pada umumnya mengabaikan dimensi lokasi dan ruang (*space*) dalam analisisnya. Disamping itu ilmu ekonomi menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotaan adalah sama dengan struktur ekonomi nasional yang dalam kenyataannya sukar diterima (Sjafrizal: 2017:2).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan *Gross Domestic Product* (GDP) pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk. (Bambang Prishardoyo.2008:2) Dalam konsep ilmu ekonomi, pembangunan dapat diartikan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dimana sebahagian besar masyarakat beralih dari taraf kehidupan yang miskin menuju kehidupan yang lebih baik (Berger, P.G.E, Ofek dan D.L, Yermach, 1997).

Dinamika pembangunan perekonomian saat ini berdampak pada sektor perekonomian yang cenderung lebih modern. Pusat-pusat perbelanjaan berbentuk gedung-gedung tinggi bermunculan. Toko-toko supermarket pengganti toko kelontongan yang bersifat tradisional muncul bak jamur baik di kota maupun pedesaan. Restoran-restoran berskala besar dan *franchise* kuliner luar negeri juga menjadi tempat “berkumpul” selain bersantap yang digemari masyarakat Indonesia. Hal tersebut seakan-akan menjadi simbol sebuah gaya hidup yang modern.

Kawasan perdagangan merupakan salah satu sektor informal yang mampu diangkat sebagai suatu tempat keinginan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu masyarakat. Kawasan perdagangan atau pasar pada masyarakat mempunyai peran penting yaitu sebagai pusat ekonomi dan pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Di bidang distribusi pasar mempunyai peranan dalam menyebarkan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan di bidang konsumsi, pasar menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Depdikbud. 1990:159).

Di sisi lain, para pedagang kaki lima dengan berbagai barang dagangan berjuang dalam memperoleh pendapatan dengan modal yang tentunya lebih rendah, tidak terorganisasi dan ilegal. Bagi kelompok “masyarakat kecil”, sektor informal ini laksana pahlawan karena dapat dijadikan sebagai sumber utama dan/atau alternatif pendapatan. Sejak akumulasi penduduk di kota-kota baik besar maupun kecil, tidak dapat tercakup dalam peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor informal. Termasuk di dalam kelompok ini adalah penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, korban pengrusakan, kaum perempuan, dan lain-lain (Pitoyo, 2007:129).

Dalam pembangunannya, peranan pemerintah kota maupun daerah sangat besar dan menentukan, disamping itu diperlukan pula peran masyarakat yang bersifat partisipatif dalam rangkamenapai tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Serupa halnya pada pembangunan perekonomian di Kota Langsa, menuju kota yang modern tentunya tidak lepas dari perkembangan perekonomian kotanya. Hadirnya tempat – tempat perbelanjaan modern baik skala kecil seperti indomaret, alfamart dan supermarket serta skala menengah yang membuktikan bahwa gaya konsumsi masyarakat dilatarbelakangi oleh sisi modern dan gaya hidup yang kian konsumtif.

Di sisi lain, sektor informal di kota ini terlihat masih bertahan khususnya dengan pedagang-pedagang kaki lima dari berbagai umur. Salah satunya adalah pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa. Di sana terdapat kurang lebih 70 pedagang kaki lima dengan berbagai tawaran barang dagangannya. Setiap harinya transaksi *cash money* selalu terjadi di

kawasan ini, walaupun ada beberapa yang berjualan dengan menu yang sama tidak menyurutkan langkah kaki konsumen untuk terus melakukan transaksi tunai.

Dari observasi singkat tersebut, peneliti menemukan bahwa mayoritas para penjual kaki lima tersebut terlihat masih usia muda dengan *range* usia sekitaran 17-40 tahun. Menjadi pedagang kaki lima dilakukan untuk mencari atau menambah penghasilan sehari-hari serta untuk memajukan perekonomian keluarga. Kreativitas, rajin, dan pantang menyerah pada hasil jualan tidak menyurutkan langkah kaki para pedagang untuk bisa *survive* dalam berbagai kondisi perekonomian.

Selain bisa mengurangi tingkat pengangguran khususnya pada skala usia produktif, para pedagang kaki lima ini juga berjasa untuk pemasukan retribusi di Kota Langsa. Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan baeang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* yang menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering disebut sebagai *mafsadah*. Untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat (Djamil, 1999: 123-125).

Memasuki awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru yang disebut dengan *coronavirus disease 2019* (covid-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan Tiongkok dan sampai saat ini sudah dipastikan 65 negara yang telah terjangkit virus Covid-19. Kejadian luar biasa oleh Coronavirus bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali, karena pada tahun 2002 *severe acute respiratory syndrome* (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit *middle east respiratory syndrome* (MERS) tahun 2012 pernah menjadi virus yang mematikan (World Health Organization).

Dampak dari covid-19 berimbas pada banyak sektor kehidupan tidak terkecuali sampai ke lapisan masyarakat seperti para pedagang. Dari observasi yang peneliti lakukan terhadap para pedagang di Kota Langsa, para pedagang kaki lima merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan khususnya Kota Langsa Provinsi Aceh. Pedagang merasakan kerugian akibat menurunnya para pembeli dan membuat perekonomian pedagang menurun.

Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis diatas, maka peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai kebangkitan ekonomi khususnya terhadap pedagang kaki lima yang menjadikan Kota Langsa sebagai kota yang bebas pengangguran, kekinian dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi lokal, bahkan menjadi *pilot project* bagi daerah-daerah lain di Indonesia bahwa kebangkitan ekonomi dapat mengatasi problem perekonomian yang paling mendasar yaitu pengangguran, kemiskinan yang mengakibatkan pendapatan daerah yang rendah.

Studi Literatur

1. Pedagang Kaki Lima dan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.

Pada tahap selanjutnya, para pedagang kaki lima inilah yang menjadi salah satu penggerak tumbuhnya perekonomian masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Basri, 2002).

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Junison, 2005). Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Michael, 2000). Menurutnya, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Selanjutnya, Faktor non ekonomi bersama sektor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pendidikan dan kebudayaan barat yang menanamkan semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru, juga merubah cara pandang, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, baik jumlah dan efisiensi mereka. Faktor politik dan administratif yang kokoh juga membantu pertumbuhan ekonomi modern.

2. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Pada dasarnya peran pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu :

- a. Derivasi dari konsep kekhalifaan
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kafiyah*)
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah adalah agen tuhan atau khalifullah untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kesejahteraan seperti yang terkandung dalam Hadist Bukhari Muslim yang berbunyi :

“Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya”.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa dalam Islam semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang kurangnya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tiak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin.

3. Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali digunakan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal dikembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di Dunia Ketiga dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi (Hart, 1991).

Konsep sektor informal sering digunakan untuk menjelaskan bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran di kota Negara sedang berkembang. Bahkan beberapa pengamat pembangunan di Negara sedang berkembang memandang sektor informal sebagai strategi alternatif pemecahan masalah keterbatasan peluang kerja. Sektor informal berfungsi sebagai “katup pengaman” yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun pendatang dari desa (Effendi, 1993). Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha-usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan untuk

mengembangkan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam bentuk hasrat, kehendak, kemauan, baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok sosial.

Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya serta keterangan yang mendukung penulisan ini, maka peneliti mengadakan penelitian di Pemerintah Kota Langsa dengan Judul Analisis Kebangkitan Perekonomian Pedagang Kaki Lima Kota Langsa Masa Pandemi Covid-19.

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah pemerintahan Kota Langsa

Ada beberapa versi sejarah mengenai awal mula berdirinya Kota Langsa. Salah satunya adalah yang menyebutkan bahwa Langsa sudah berdiri sejak abad ke-15. Pada abad tersebut salah seorang pangeran dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat berlayar ke daerah Langsa melalui Selat Malaka dan berlabuh di daerah Titi Kembar (sekarang Gp. Baroh Langsa Lama, Kec. Langsa Lama).

Pangeran tersebut membuka hutan belantara di daerah ini untuk dijadikan lahan. Saat itu, datang seekor burung elang besar yang berputar-putar di wilayah tersebut sehingga dinamakan lah daerah ini dengan sebutan Langsa. Secara harfiah, kata Langsa berasal dari gabungan kata Elang dan kata Sa (bahasa Aceh untuk kata satu) menjadi Elangsa dan sekilas terdengar Langsa. Walaupun ada pendapat yang berbeda mengenai asal usul penamaan Kota Langsa, hampir semua sumber itu secara eksplisit menghubungkan elang sebagai asal usul penamaan Kota Langsa.

Mengenai penataan kota, sebuah referensi (Kaskus, 2014) menyebutkan bahwa Kota Langsa awalnya direncanakan Kolonial Belanda untuk dibangun dengan memakai master plan pendirian Kota Bogor, sehingga kota ini merupakan satu-satunya kota dengan bentuk tata ruang awal yang relatif sangat baik di daerah Aceh. Jika Kota Bogor memiliki Kebun Raya Bogor dan telah menjadi trademark kota tersebut, maka di Kota Langsa terdapat suatu kawasan di Gampong Paya Bujuk Seuleumak seperti Kebun Raya Bogor, yang sekarang dinamakan Hutan Kota Langsa (disebut juga Hutan Lindung).

Visi dan Misi Pemerintah Kota langsa :

Visi Kota Langsa adalah “*Langsa Kota Jasa dan Industri yang maju dan Islami*”. Adapun misi Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan agar lebih responsif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang berbasis smart city (e-government);

2. Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, indah, nyaman, tertib, dan aman;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air bersih untuk masyarakat;
6. Melaksanakan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah;
8. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
9. Mengembangkan olah raga, kesenian, kepemudaan, dan pramuka;
10. Melakukan pelimpahan kewenangan pemerintah kota langsa kepada pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan;
11. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan dengan pemerintahan gampong, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;
12. Memperkuat kerjasama dengan wilayah *hinterland* (Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Gayo Lues) (Diskominfo Langsa, 2017)

2. Profil Pemerintahan Kota Langsa

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04°24'35,68" - 04°33'47,03" Lintang Utara dan 97°53'14,59" - 98°04'42,16" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Taminag, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850 – 4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0 – 29 m diatas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata – rata 75%.

Secara geografis Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa – rawa dengan penyebaran cukup luas.

Tabel 1.1 Luas Kota Langsa Menurut Kecamatan, 2015

Kecamatan/ Sub District	Luas/ Area (Km ²)	Luas/ Area (Ha)	Persentase/ Percentage
Langsa Timur	78,23	7 823	32,62
Langsa Lama	45,05	4 505	18,78
Langsa Barat	48,78	4 878	20,34
Langsa Barö	61,68	6 168	25,72
Langsa Kota	6,09	609	2,54
Jumlah/ Total	239,83	23 983	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2015

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, ibu kota Privinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administrasi

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.

Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.

Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 15 desa, sedangkan Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

Tabel 1.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Langsa

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Langsa Timur	16	0
2	Langsa Lama	15	0
3	Langsa Barat	13	0
4	Langsa Baro	12	0
5	Langsa Kota	10	0

Sumber: Qanun Nomor 4 Tahun 2010

3. Peran Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat

Di Indonesia, dalam tiga dekade terakhir jumlah pekerja informal terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen (1971) menjadi 36 persen dan 42 persen (1980 dan 1990). Sebagian besar pekerja informal khususnya diperkotaan terserap kedalam sektor perdagangan, diantaranya perdagangan perjalanan atau kaki lima.

Perdagangan jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama dikalangan kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan yang fleksibel (mudah keluar - masuk), modal yang dibutuhkan relatif kecil dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit.

Rekaman Kejadian (Moment Opname)

“Peran kami selaku pemerintah untuk meningkatkan PAD Kota Langsa salah satunya adalah dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Langsa, himbauan dari Walikota Langsa terus membantu masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa kami juga menyediakan fasilitas yaitu dengan pemberian pinjaman sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia. Modal pinjaman yang diberikan melalui Bank yang ditunjuk yaitu sebesar Rp. 20.000.000 per

orang atau per pedagang kaki lima, dengan tujuan untuk membantu kegiatan pedagang kaki lima”. (wawancara)

Rekaman Kejadian (*Moment Opname*)

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa dalam hal ini untuk membantu pedagang kaki lima di Kota Langsa yaitu dengan memberikan fasilitas senyaman mungkin, untuk tahap awal kami memberikan pelayanan mulai dari lapak penjualan, tenda dan yang sedang kami usahakan adalah masuknya sarana dan prasarana air bersih guna untuk mempermudah pedagang kaki lima melakukan kegiatan penjualan. Sedangkan untuk akses bagi pengguna pejalan kaki/sepeda motor/mobil sedang kami upayakan untuk mengalihkan perjalanannya agar tidak terganggu penjualan tersebut.” (Wawancara)

Berbagai kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa, baik yang bersifat *exclusion* (penggusuran) maupun *inclusion* (tendanisasi), sebahagian besar terbukti Pemerintah Kota Langsa masih terus melakukan upaya dalam peningkatan dan pembenaan terhadap pedagang kaki lima di Kota Langsa.

Sebahagian besar Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Langsa adalah penduduk asli Kota Langsa dimana tujuan mereka berjualan adalah untuk menyambung hidup atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi saat ini maka masyarakat lebih cenderung untuk berjualan.

Rekaman Kejadian (*Moment Opname*)

“Pemerintah Kota Langsa juga melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima contohnya seperti kegiatan seminar yang di lakukan oleh Pemda dan bekerjasama dengan Instansi terkait, agar masyarakat Kota Langsa khususnya pedagang kaki lima mengerti dan menguasai tentang konsep dasar penjualan. Selain itu juga pemerintah kota langsa terus berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan dikarenakan pedagang kaki lima yang berada di kota langsa merupakan salah satu obyek wisata kuliner”. (Wawancara)

4. Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Munculnya istilah Pedagang Kakai Lima ini bermula dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kehidupan para Pedagang Kaki Lima sering

dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, karena mengganggu pemandangan.

Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa merupakan salah satu asset pendapatan bagi Pemerintah Kota Langsa. Namun dalam hal ini pemerintah Kota Langsa harus melakukan pembinaan dan memberi perhatian khusus terhadap Pedagang Kaki Lima dikarenakan Pedagang Kaki Lima merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat Kota Langsa dan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Langsa yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakatnya.

Rekaman Kejadian (Moment Opname)

“Selama masa pandemic ini kami merasakan sangat berat sekali terutama pada penjualan dan berdampak pada hasil penjualan. Masa pandemi cukup hanya bertahan saja sudah Alhamdulillah sementara bantuan dari pemerintah belum merasakan. Hanya saja dari Pemerintah Kota Langsa memberikan keringanan pada biaya biaya-biaya seperti listrik, sewa tempat, dan retribusi sampah”. (Wawancara)

Apabila diperhatikan para Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa adalah asli penduduk Kota Langsa untuk mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Secara umum, Pedagang Kaki Lima banyak yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu dan anak-anak muda yang belum ada pekerjaan tetap sehingga mereka dengan sendirinya membuka usaha dengan modal sendiri, hal inilah yang menjadi pusat perhatian kepada Pemerintah Kota Langsa dan Dinas yang ditunjuk untuk mengelola Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Langsa.

Rekaman Kejadian (Moment Opname)

“Saya sudah lama dek berjualan disini, lebih kurang hampir 2 tahunan gitu, tapi selama saya berjualan ya gak ada apa-apa yang diberikan pemerintah. yaaa..... palingan hanya penyediaan lapak saja, itupun kami berjualan disini hanya bisa sore saja berkisar jam tiga sore sampai malam lah. Contohnya seperti air pun gak ada masuk keran ada air gak ada, intinya serba kekurangan lah gitu, harapan yaaaa semoga pak wali bisa memberi fasilitas yang baik, apalagi pendapatan kami Cuma dari sini saja, dengan adanya pandemi seperti ini sangat berdampak pada pendapatan sehingga ekonomi keluarga juga berpengaruh”. (Wawancara)

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah atau jalan fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Rekaman Kejadian (Moment Opname)

“Omset yang kami dapati setiap hari nya terkadang tidak tentu, apalagi pemerintah sering menerapkan jam malam untuk penularan wabah covid. Tentunya kami mengikuti anjuran

pemerintah sehingga jam 10 malam kami sudah tutup, sehingga pendapatan kami juga berkurang”. (Wawancara)

Rekaman Kejadian (*Moment Opname*)

“Harapan kami pak kepada pemerintah kota langsa untuk melihat lihat kami pedagang kaki lima ini, karena secara tidak langsung kami disini juga membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran, coba byangkan aja pak I kami yang berjualan di sini berapa merekrut pekerja, contoh seperti saya aja mempekerjakan dua orang karyawan, kemudian kami disini membayar pak retribusi ke pemerintah setiap sorenya ada yang mengutip. Adapun besaran uang retribusi yang dikutip Rp. 2.000 untk retribusi sedangkan Rp. 1.000 untuk sampah, namun penyediaan akses lainnya belum ada sampai saat ini, jadi yaaaa masih sangat serba kekurangan”. (Wawancara)

5. Prospek Pengembangan Pedagang Kaki Lima Sebagai Penghasil Retribusi PAD Kota Langsa

Kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara cepat sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga saling berkaitan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut perlu diketahui secara terperinci beserta sifatnya. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah, hal ini cukup logis karena dalam era otonomi tersebut masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat. (Sjafrizal. 2017:89)

Rekaman Kejadian (*Moment Opname*)

“untuk perhatian khusus terhadap pedagang kaki lima kami selaku pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa selalu menampung aspirasi dari pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Kota Langsa guna untuk memberikan pelayanan yang baik demi kemajuan para pedagang, namun dalam hal ini perlahan-lahan kami kelola dengan baik”. (Wawancara)

Pada dasarnya peran pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh yang menganut sistem Syariat Islam memiliki dasar rasionalitas yang kokoh, dalam pandangan Islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu: (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia (2015: 446).

- a. Derivasi dari konsep kekhalfahan
- b. Kosekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kafiyah*)
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah

Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima pada poin (a) menerangkan bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu perdagangan sektor informal yang perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai salah satu pilihan dan penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. (Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2008)

Rekaman Kejadian (*Moment Opname*)

“Dalam hal pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa kami selaku pemerintah ada juga memberikan fasilitas terutama fasilitas KUR bagi UMK yang bekerja sama dengan beberapa Bank di Kota Langsa diantaranya Bank BRI, Mandiri dan Bank BN, dan kerjasama itu atas dasar Peraturan Menteri Bersama tentang UMKM dan diteruskan atas dasar wewenang Walikota Langsa. Fasilitas itu pada tahun 2017 memberikan penyaluran KUR dari Bank BRI sebesar Rp. 76 Milyar untuk pengembangan Pedagang Kaki Lima atau UMK di Kota Langsa. Sedangkan untuk sarana pada tahun 2016 melalui peraturan Walikota Langsa kami juga memberikan fasilitas seperti : tenda yang berukuran 3 x 3/unit untuk UMK, dan kemudian kami juga menyediakan air bersih dan meteran listrik. Salah satunya untuk PAD Kota Langsa yang bersumber dari pedagang kaki lima ini yaitu retribusi yang dikutip perharinya antara lain Rp. 2.000 retribusi dan Rp. 2.000 sampah atau perbulannya sebesar Rp. 3,5 – Rp. 4 Juta dan ini disetorka ke Disperindag dan nantinya di setorkan ke bendahara daerah langsa”. (Wawancara)

Dari permasalahan diatas perintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan amanahnya, hal ini dikarenakan kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Asimetri dan kekurangan informasi
- b. Pelanggaran moral
- c. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis

Kesimpulan

Dari hasil observasi di lapangan dan analisis data serta temuan studi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Aktivitas Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat Kota Langsa yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal.
- b. Lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Langsa menyebabkan pola penyebaran berbeda sehingga menimbulkan paradigma bagi Pedagang Kaki Lima, sedangkan saat ini pedagang kaki lima cenderung mengelompokkan dengan usaha yang sejenisnya, jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan.
- c. Meskipun telah dibuat tentang penataan pedagang kaki lima, namun baik pedagang kaki lima maupun masyarakat menganggap perlu diadakan pengaturan yang lebih lanjut untuk mendisiplinkan bagi pedagang kaki lima tersebut yang melakukan penjualan.
- d. Untuk akses sarana dan prasarana sebaiknya Pemerintah Kota Langsa membantu para pedagang kaki lima untuk memberikan fasilitas yang baik, dikarenakan pedagang kaki lima ini bisa dijadikan sebagai salah satu wisata kuliner di Kota Langsa, dan dapat juga mendorong pertumbuhan ekonomi dikalangan masyarakat bawah.

- e. Fasilitas pinjaman modal KUR yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan menteri bersama dan ditetapkan dalam peraturan walikota langsa untuk mendata kembali bagi pedagang yang membutuhkan modal yang berdampak pada covid-19.

Referensi

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2008). *Departemen Agama RI*. Bandung: Diponegoro.
- Arifin, M. (2010). *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang Seusi Sunnah Nabi Muhammad SAW)*. Yogyakarta: Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2016.
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Berger, P.G.E, Ofek., & Yermach, D. L. (1997). Managerial Entrenchment and Capital Structure Decisions. *Journal of Finance*. 52. 1411-1438
- Burhan, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publikdan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Effendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ekonomi Islam. (2008). Pusat Pegkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perseptif maqashid syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Fuad, A. B. M. (2012). *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan (kumpulan hadits shahih Bukhari Muslim)*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Hart, K. (1991). *Sektor Informal, Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junison, H. (2005). Analisis Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Kajian ekonomi*. 4(1).
- Michael. T. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mudayana, E. (1995). *Pariwisata Prajna Artha Buwana, Pariwisata Memacu Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia, Orasi Dies Natalis ke-33 dan Wisuda ke-11, Hotel Horison Bandung*.
- Noer, E. T. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pitoyo, A. J. (2007). *Dinamika Sektor Informal Di Indonesia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya Dalam Sistem Ekonomi Makro. Populasi 18(2) ISSN: 0853-1262*.
- Poerwandari, K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. 1(1).h.2.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, Point (a). Tanggal 27 Oktober 2008

Riduwan, & Sunarto. (2010). *Pengantar Statistik (Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis)*. Bandung: Alfabeta.

Sjafrizal. (2017). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang Kaki Lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima) (Selasa 27 Oktober 2015)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang Kaki Lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima) (Selasa 27 Oktober 2015)